

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kawasan perkotaan dewasa ini cenderung mengalami permasalahan tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin rumit. Selain itu daya dukung lingkungan fisik dan sosial yang ada menurun sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dapat menimbulkan kerentanan sosial. Permasalahan lainnya berkaitan dengan tingginya tingkat konversi lahan, terutama lahan yang seharusnya dilindungi agar tetap hijau menjadi daerah terbangun, menimbulkan dampak terhadap rendahnya kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi di Indonesia menurut Nasikun¹ adalah “merebaknya kontradiksi ekonomi politik akibat pertumbuhan perkotaan”. Kota²- dipandang sebagai pusat kemajuan (*baca*: pembangunan ekonomi atau industri) yang menawarkan peluang lebih besar dalam hal lapangan pekerjaan serta pusat berbagai pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, rekreasi, perdagangan dan bisnis, dan sejumlah fasilitas pelayanan ekonomi, sosial-budaya. Kebijakan pembangunan yang dilakukan hampir semua negara berkembang cenderung mengutamakan pembangunan kota (*urban bias*) dimana konsentrasi ekonomi hanya dilakukan di perkotaan, sehingga arah pembangunan untuk mempercepat proses industrialisasi dan modernisasi di kota-kota besar sebagai pusat perdagangan dan bisnis berakibat kepada munculnya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.

¹ Lihat, Nasikun, *Kata Pengantar*, dalam Alan Gilbert dan Josef Gugler, “Urbanisasi dan kemiskinan di Dunia Ketiga”, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1996) hlm. xii

² Secara fisik, kota merupakan daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan satu kesatuan tempat kediaman, selain itu kota juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Dalam perspektif sosiologi, kota merupakan salah satu organisasi sosial dari sekumpulan individu dalam jumlah yang cukup besar, sangat kompleks dengan berbagai strategi hidup yang kurang terikat lagi pada pertanian. Kompleksitas kota ditandai dengan semakin menajamnya perbedaan sosial yang didasari profesi, status, ras, bahasa, dan sebagainya. Gejala perbedaan antar individu tersebut akan terwujud dalam pengelompokan masyarakat yang bermukim. (Suparlan, 1991)

Pembangunan kemudian meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi dan memunculkan kebutuhan baru, dan seterusnya (*dynamic phenomenon of urbanization*). Perubahan struktur fisik kota dan struktur fungsional berarti semakin besar input alam (sumber daya alam) yang diperlukan untuk menunjang pembangunan dan hasil pembangunan fisik atau produk maupun kegiatan penggunaan produk menghasilkan output yang menimbulkan beban atau berdampak pada lingkungan alam.

Paradigma tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota dalam dasawarsa terakhir yang mengakibatkan meningkatnya penduduk perkotaan dari tahun ke tahun. Penduduk perkotaan di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat dengan nyata. Bila pada tahun 1980 prosentase penduduk perkotaan baru mencapai 32,8 juta jiwa atau 22,77% dari total penduduk nasional; pada tahun 1995 telah meningkat menjadi 35,91%, tahun 2000 mencapai 42,43%, dan 90 juta jiwa atau 44% pada tahun 2002 dan tahun 2020 diperkirakan mencapai 15 juta jiwa atau 52,20% dari total penduduk nasional (Pigay,2005:109). Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota seperti kawasan hunian, ruang terbuka publik dan fasilitas umum dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk kota yang pesat tidak berbanding lurus dengan kebutuhan hidup dan penyediaan lahan permukiman yang memadai. Kualitas permukiman berkaitan erat dengan keadaan sosial-ekonomi penghuninya. Kemampuan penyediaan perumahan secara formal, seperti real estat, dan perumahan dari pemerintah atau swasta, sangat terbatas dan hanya menyentuh golongan menengah ke atas. Sementara golongan berpendapatan rendah tak terjamah dan dibiarkan mencari jalan keluar sendiri yang dampaknya adalah tumbuh suburnya permukiman informal (*informal housing*) yang memiliki kesan kumuh³. Seringkali kawasan ini dituding sebagai ancaman serius bagi sistem dan mekanisme kehidupan perkotaan, sebab terkadang kawasan yang terjadi secara

³ Permukiman yang kondisi fisik hunian dan tata ruangnya mengungkapkan kondisi kurang mampu atau miskin dari para penghuninya. Penataan ruang hunian “semrawut” yang disebabkan oleh penggunaan ruang tinggi tingkat kepadatan volume maupun frekuensinya dan tidak terawat dengan baik. Kurang memadai dalam memberikan fasilitas umum seperti air bersih, pembuangan limbah dan sampah, jalan dan berbagai fasilitas untuk kegiatan sosial. Parsudi, 1996. Hal 3-50.

spontanitas ini menjadi kawasan yang permanen dan sengaja menggunakan lahan-lahan yang seharusnya bukan diperuntukkan sebagai hunian. Terkadang pula kondisi kumuh yang bersahaja memang area yang betul-betul dihuni oleh penduduk nyaris tidak berdaya akibat tertindas oleh perkembangan kota yang tidak memasukkan penghuninya sebagai bagian dari perencanaan kota.

Lahirnya permukiman kumuh (*slum-squatter*) di perkotaan tidak terlepas dari perkembangan dan penambahan penduduk kota, antara lain akibat urbanisasi. Permukiman kumuh adalah sebuah satuan kehidupan atau komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas sosial dan budaya yang jelas. Secara sosial dan ekonomi, sebuah komunitas permukiman kumuh bersifat heterogen. Warganya mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, asal-usul yang berbeda-beda, mengenal ada pelapisan sosial dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Permukiman kumuh dapat terwujud sebagai permukiman liar, tetapi dapat juga merupakan bagian dari sebuah kampung perkotaan secara administrasi terwujud sebagai sebuah kelurahan atau RW, terwujud sebagai sebuah RT atau bagian RT atau bagian RW, atau juga merupakan sebuah RW⁴.

Stigma negatif terhadap komunitas dan lingkungan permukiman kumuh pada hakekatnya mengingkari kesejarahan kota, sedangkan praktek penggusuran dan pengusiran merupakan praktek pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, hak tradisional maupun hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga dan masyarakatnya. Pada sisi lain, stigmatisasi tersebut sekaligus menunjukkan adanya sindrom inferioritas di kalangan pengelola kebijakan dan pemerintahan, yakni berupa ketidakberdayaan dan rendahnya kapasitas dalam mengelola pembangunan dan penciptaan kesejahteraan rakyat.

Persoalan lebih mendasar dari stigmatisasi komunitas di lingkungan permukiman kumuh adalah pembangunan bias sektoral yang berorientasi hanya pada pertumbuhan. Rumah hunian dan lingkungan permukiman merupakan bagian eksistensial bagi setiap manusia sehingga praktek penggusuran dan pengusiran dapat dikatakan sebagai praktek dehumanisasi pembangunan.

Perspektif pembangunan lingkungan permukiman merupakan pembangunan sektoral yang harus menempatkan sistem dan rencana penataan

⁴ Op.Cit.hal 3-50

ruang yang baik dan proporsional sebagai acuannya. Kawasan perkotaan memiliki sistem tata ruang timbal-balik yang memberi dan diberi arahan sistem pemanfaatan dengan peruntukan kawasan budidaya dominan, baik secara sosial, ekonomi, budaya dan ramah terhadap lingkungan ekologis.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, permukiman kumuh adalah produk kebijakan pembangunan gagal, tata pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang berbelit-belit, pasar pertanahan yang tidak berfungsi, sistem keuangan yang tidak jelas, dan kemauan politik yang lemah (UN HABITAT, 2003). Dalam konteks ini pula Sidang Millenium PBB menganggap penting dan mendesak untuk mencantumkan target peningkatan kondisi kawasan kumuh perkotaan ke dalam Deklarasi Millenium Development Goals antara lain peningkatan yang signifikan terhadap kehidupan 100 juta penduduk miskin di lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2015. Di Indonesia sendiri, dari sekitar 90 juta jiwa penduduk perkotaan di tahun 2001, sekitar 20 juta (hampir 25%) tinggal di permukiman kumuh (UN-HABITAT, 2001). Luas permukiman kumuh di Indonesia juga terus bertambah, dari 40.053 hektar di tahun 1996, 47.393 hektar di tahun 1999, sampai 54.000 hektar di tahun 2004. Total wilayah seluas 54.000 hektar tersebut diperkirakan tersebar di 10.065 lokasi di seluruh Indonesia (kebanyakan di wilayah perkotaan), dan dihuni oleh sekitar 17.2 juta penduduk.

Upaya-upaya untuk mengatasi permukiman kumuh sudah diselenggarakan sejak Pelita I PJP I sampai PJP II, PROPENAS dan sampai RPJM. Upaya tersebut berkembang dalam substansi, sasaran-sasaran, strategi, pendekatan secara komprehensif. Sejak dilaksanakan program-program tersebut sampai sekarang ; KIP (dengan berbagai variasinya), KIP Plus, P2KP, NUSSP dan sekarang dengan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Program-program tersebut berkembang terus, membutuhkan peran-peran baru berupa pendamping, pengembang masyarakat. Komunitas ditempatkan sebagai subyek pembangunan, bantuan diturunkan untuk menumbuhkan dan memampukan kelembagaan masyarakat (KUBE, TPM, dll) yang diharapkan dapat menjadi kendaraan bagi upaya pengembangan masyarakat.

Kalau kita simak perkembangan program tersebut diatas, walaupun berubah namanya, ada kesamaannya yaitu strategi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi. Ini adalah corak intervensi kebijakan akibat proses pemiskinan dan bukan intervensi kebijakan penyebab kemiskinan itu sendiri. Pertumbuhan permukiman kumuh (akibat kemiskinan) lebih besar dari kapasitas pemerintahan untuk memperbaikinya. Kemudian tidak memiliki keberlanjutan (*sustainability*) dan akuntabilitas publik, hal ini disebabkan program-program itu berbentuk “proyek” sehingga setelah proyek selesai para konsultan pelaksana tidak peduli lagi apakah program itu berjalan atau tidak.

Kota Jakarta sebagai ibukota Negara. Dengan luas wilayah sekitar 664,33 km², DKI Jakarta menanggung penduduk yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami kenaikan. Jika tahun 1961, kepadatan penduduk DKI Jakarta sekitar 4,3 ribu jiwa per km², maka tahun 2000 mencapai 14,7 ribu jiwa per km² dan 16,05 ribu jiwa per km² tahun 2005. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut kepadatan penduduk DKI Jakarta diperkirakan naik menjadi lebih dari tiga hingga empat kali lipat. Kepadatan penduduk Jakarta merupakan konsekuensi dari pembangunan yang tidak merata. Menurut Evers (2002) pembangunan memperlihatkan adanya dualisme wajah Jakarta saat ini masih dicirikan dengan struktur bangunan moderen yang diselingi permukiman kumuh dalam kota (*inner city slums*) dan permukiman liar.

Permukiman kumuh umumnya secara ekonomi-sosial digambarkan sebagai tempat permukiman penduduk berpenghasilan rendah sampai menengah dan merupakan area permukiman sangat padat penduduk (Jelinek,1991; Korff,1996), memiliki luas bangunan kurang dari 9 m²/orang⁵. Kebanyakan penduduk bekerja di *shadow economy* terutama bekerja pada sektor informal kota (Muray,1991; Ever dan Korff, 2002: 228) atau mempunyai mata pencaharian tambahan disektor informal (Parsudi, 1996: 3) khususnya di bidang jasa pelayanan yang telah memungkinkan bagi warga permukiman tersebut untuk dapat hidup sebagai komunitas mandiri dan kekumuhan permukiman menghasilkan

⁵ Gondokusumo, Djodi Madrim.2005, dalam bunga rampai “Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21.YPD dan URDI. hal. 411

kehidupan ekonomi informal. Sebaliknya juga dikumuhkan oleh corak kehidupan ekonomi mereka, minimnya pelayanan sosial (air bersih, pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan), ketidakjelasan status hunian (*tenure*).

Menurut Burgess (dalam Parsudi, 1996 : 3-47) secara geografis permukiman kumuh berada di dekat pusat-pusat kegiatan ekonomi kota dan wilayah-wilayah industri atau sistem konsentrik. Kemudian tidak terencana (*spontaneous settlements*) tidak ada fasilitas permukiman yang baik atau berada dalam kondisi lingkungan buruk (Kenworthy et all, 1997). Menurut data Badan Pusat Statistik, untuk tahun 2005 jumlah penduduk DKI Jakarta yang menempati lokasi tak layak huni mencapai 33.230 jiwa yang tersebar baik di lingkungan permukiman kumuh dalam kota dan permukiman kumuh pinggiran kota⁶.

Kekumuhan lingkungan permukiman cenderung bersifat paradoks, bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, kekumuhan adalah kenyataan sehari-hari yang tidak mereka masalahkan, sedangkan di pihak lain yang berkeinginan untuk menanganinya khususnya pemerintahan, masalah kumuh adalah suatu permasalahan yang perlu segera ditanggulangi penanganannya. Karena buruknya kondisi perumahan dapat menurunkan kualitas hidup penghuninya sehingga menimbulkan degradasi lingkungan yang fatal mengarah kepada terjadinya bencana alam, seperti kebakaran, banjir, kemacetan, terjangkitnya penyakit endemik serta sarat masalah sosial dan kemiskinan.

DKI Jakarta sebagai sebuah kota besar dengan kompleksitas persoalan telah menjauhkan aspek pembangunan masyarakat sebagai pilar dari keseimbangan lingkungan, sehingga proyek modernisasi perkotaan bersifat paradoks ditengah pesatnya pembangunan. Jakarta adalah cermin dari sebuah implikasi paradigma pembangunan yang dianut oleh Indonesia yang tidak berhasil menyeimbangkan antara tingkat pertumbuhan dan perubahan ekonomi dengan peningkatan kebutuhan sosial dan kualitas lingkungan kehidupan bagi warganya. Heterogenitas penduduk kawasan kumuh perkotaan sebagai dimensi modal sosial di Jakarta belakangan ini telah diabaikan, jauh berada di luar alam pikir pembangunan yang berkelanjutan. Padahal di berbagai belahan dunia dewasa ini, kesadaran akan pentingnya faktor tersebut cukup tinggi, dan sedang menjadi

⁶ Lihat, "www.kompas.com/nasional/tak_ada_ruang_kota_bagi_kaum_miskin_Jakarta", tanggal 10 Agustus 2007. diakses pada tanggal 27 November 2007. pkl. 14.15 wib

kepedulian bersama. Modal sosial dalam kawasan permukiman kumuh perkotaan diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan, dan kesaling menguntungkan untuk mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Bekerjanya modal sosial komunitas tersebut dapat mengurangi atau menghentikan kerentanan sosial yang terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan kumuh.

Francis Fukuyama (1999) dengan meyakinkan berargumentasi bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial sebagai *sine qua non* bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Di dalamnya merupakan komponen kultural bagi kehidupan masyarakat modern. Putnam(1993:7) menempatkan modal sosial sebagai unsur utama pembangunan sebuah masyarakat sipil (*civil society*). Modal sosial mengacu kepada aspek-aspek utama dari organisasi sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma(*norms*), jaringan sosial (*social networks*) dapat meningkatkan efisiensi dalam masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan kerjasama yang terkoordinasi untuk kepentingan bersama dan dapat meningkatkan keuntungan dalam bentuk modal fisik dan modal manusia. Modal sosial komunitas kumuh perkotaan mengatur bagaimana kepercayaan antar warga tetap terjaga, dimana masing-masing warganya saling mempercayai satu sama lain. Kemudian norma-norma yang dianut dapat menciptakan keadilan bagi para warganya. Jaringan yang dirajut diantara warga tentunya akan membuat pembangunan kawasan berkembang maju dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Paradigma pembangunan masyarakat yang menghargai heterogenitas sosial budaya, akan membuat pembangunan memiliki daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan yang tinggi, yaitu pembangunan yang menghargai ekologi dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Pada dasarnya masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan komunitasnya. Suatu komunitas yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi pada masyarakat

yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Komunitas yang bersatu dan memiliki hubungan keluar lingkungan kelompoknya (eksternalitas) secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefleksikan kekuatan itu sendiri.

Penelitian ini diperlukan untuk mengukur dan menemukan mengenai pengaruh modal sosial yang dimiliki penduduk kawasan permukiman kumuh dan padat perkotaan (*inner city slums*), yaitu di Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru terhadap daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan dalam pencapaian pembangunan partisipatif dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Peneliti mengambil tema permukiman kumuh perkotaan dikarenakan peneliti menilai bahwa masyarakat permukiman kumuh perkotaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keseluruhan masyarakat kota. Oleh karena dalam pembangunan kota juga harus mendapat perhatian sebagaimana mestinya komunitas lainnya. Kualitas hidup dapat diperoleh dengan menguatkan partisipasi pembangunan dan kesadaran warganya dalam menjaga dan melindungi lingkungan berkelanjutan sehingga keberlanjutan kualitas hidup dan lingkungan tetap terjaga.

1.2. Perumusan Masalah

Kota adalah sistem terbuka. Kawasan kota merupakan salah satu subsistem pembentuk kota itu, saling berinteraksi dengan subsistem lain di luar kota sehingga kota memiliki sifat diversitas dan interdependensi. Proses-proses dalam sistem kota dapat dipahami dengan cara pandang holistik, memandang entitas-entitas sebagai keseluruhan dan bagian-bagian entitas tidak dapat diisolasi tanpa melihat aspek keseluruhan.

Permukiman kumuh di Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru memperlihatkan bahwa sedang berlangsung ketidakberlanjutan kehidupan kota. Tekanan jumlah penduduk terus meningkat dan pemanfaatan lahan untuk permukiman warga tidak terkendali menyebabkan daya dukung lingkungan kehidupan semakin terbatas. Keterbatasan daya dukung lingkungan membawa implikasi terhadap menurunnya kualitas hidup warganya.

Keberlangsungan kota masih terhambat oleh faktor internal (modal sosial) yang tidak maksimal difungsikan dan eksternal (*stakeholder* pemerintahan dan swasta), akibatnya kekumuhan itu merupakan implikasi negatif dari proses pembangunan yang keliru. Sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam mendukung kehidupan warga supaya kualitas hidupnya meningkat adalah dengan menghidupkan modal sosial komunitas yang selama ini terabaikan oleh pembangunan yang sentralistik. Modal sosial yang bersifat inheren dengan komunitas seharusnya dapat berperan dalam memajukan kehidupan komunitas kumuh perkotaan. Kepercayaan, norma serta jaringan sosial perlu mendapatkan perhatian, karena dengan begitu peningkatan daya dukung lingkungan akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan kehidupan penghuninya.

Dalam konsep ini, peneliti ingin melihat dan mengukur pengaruh antara modal sosial komunitas di permukiman kumuh perkotaan terhadap daya dukung lingkungan sehingga dapat terwujud pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dari uraian di atas maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh modal sosial komunitas permukiman kumuh (*inner city slums*) di Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru terhadap peningkatan daya dukung lingkungan?
2. Bagaimanakah peran dan bentuk modal sosial komunitas permukiman kumuh (*inner city slums*) di Kampung Rawa Barat dalam meningkatkan daya dukung lingkungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Mengukur sejauhmana *score* Modal Sosial Komunitas di Kampung Rawa Barat.
2. Mengukur sejauhmana *score* Daya Dukung Lingkungan di Kampung Rawa Barat.
3. Mengukur sejauhmana pengaruh Modal Sosial Komunitas terhadap Daya Dukung Lingkungan di Kampung Rawa Barat.

1.4. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian akan memperlihatkan hubungan modal sosial komunitas terhadap daya dukung lingkungan sehingga dapat dipergunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan sosial terhadap penataan ruang permukiman kumuh terutama di daerah padat penduduk dan perbaikan kualitas lingkungan.
2. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan konsep modal sosial sebagai bagian dari kajian sosiologi perkotaan yaitu analisis tata ruang perkotaan /spatial area. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang luas terhadap bagaimana modal sosial komunitas fungsional bagi peningkatan kualitas hidup penghuninya yang secara otomatis meningkatkan daya dukung lingkungan.
3. Untuk penelitian lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti lain untuk melakukan studi lanjutan atau studi komparatif tentang modal sosial dalam setiap aspek dalam ruang atau kondisi sosial budaya dan waktu yang berbeda. Sehingga memperkaya hasil kajian empirik, dapat studi lanjutan peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengelaborasi peran modal sosial terutama dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas dan peka terhadap ekosistem –ekologis lingkungan dan peranan modal sosial bagi terciptanya interaksi sosial yang bermutu dan bertanggungjawab.

1.5. Batasan Penelitian

Hal-hal yang menjadi keterbatasan penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Resistensi warga terhadap penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, penelitian ini diasumsikan warga berhubungan dengan Pemilu 2009 dan partai politik, sehingga mereka mengharapkan *feedback* dari peneliti berupa materi. Namun demikian, hal tersebut dapat diantisipasi dengan menjelaskan maksud dan tujuan survei kepada aparat birokrasi kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Kampung Rawa Barat.

2. Waktu penarikan data terhadap responden dilakukan pada sore sampai malam hari karena kebanyakan responden pada pagi sampai sore melakukan aktifitas kerja di luar pemukiman. Hal ini yang menyebabkan responden kurang responsif dan utuh dalam menjawab pertanyaan kuisioner, namun peneliti mencoba memudahkan responden untuk menjawab dengan utuh dan tanpa beban dengan memberikan pertanyaan yang sederhana dan fokus sesuai dengan panduan di kuisioner.
3. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel Kelompok dan Jaringan Sosial, Kepercayaan dan Solidaritas Sosial, Tindakan Bersama dan Kerjasama, Informasi dan Komunikasi, Kohesi dan Inklusi Sosial yang dapat untuk mengukur kuantitas dan kualitas lingkungan hidup warganya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa variabel-variabel diluar variabel teruji juga berpengaruh terhadap peningkatan daya dukung lingkungan permukiman.
4. Pendekatan kuantitatif mungkin saja kurang dapat menangkap aspek-aspek struktural dan kognitif dari modal sosial dan daya dukung lingkungan secara lebih mendalam dan utuh. Masalah ini dapat diantisipasi dengan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sesuai dengan panduan kuisioner sehingga responden dapat mengungkapkan informasinya secara lebih mendalam.

1.6. Model Operasional Penelitian

1.6.1. Identifikasi Variabel

Untuk memperjelas makna dari variabel dependen dan independent, perlu diuraikan pengertian masing-masing variabel tersebut dan cara pengukurannya.

a. Variabel dependent

Variabel dependent adalah daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup dalam menerima tekanan perubahan dan atau dampak positif-negatif yang ditimbulkan dari kegiatan manusia, agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Peneliti akan menggunakan tiga pendekatan yang dapat dikategorikan sebagai variabel dalam daya dukung lingkungan yang bekerja secara *integrated* satu dengan yang lainnya, yaitu :

1. Dimensi Lingkungan Fisik
2. Dimensi Lingkungan Sosial
3. Dimensi Lingkungan Ekonomi

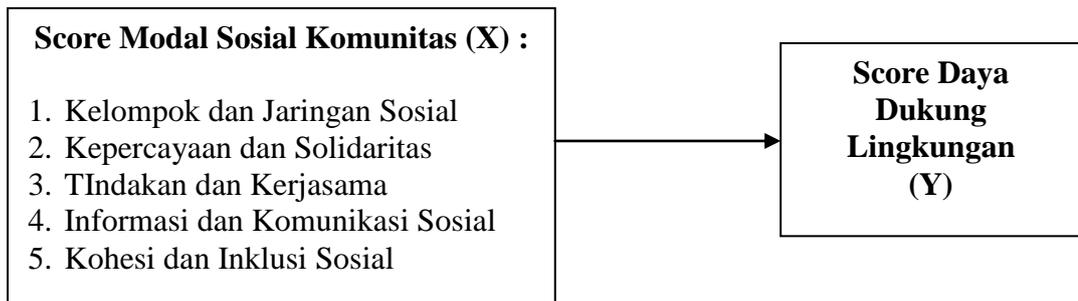
b. Variabel Independent

Menurut Putnam bahwa inti modal sosial adalah terdiri dari norms, trust dan network. Untuk mengoperasionalkan kedalam konsep penelitian maka dimensi modal sosial tersebut diturunkan kedalam beberapa variabel-variabel yang mengintegrasikan dua konsep yang memiliki keterkaitan yang utuh (world Bank, 2002), yaitu :

1. Kelompok dan Jaringan Sosial
2. Kepercayaan dan Solidaritas
3. Tindakan bersama dan Kerjasama
4. Informasi dan Komunikasi
5. Kohesi dan Inklusi sosial

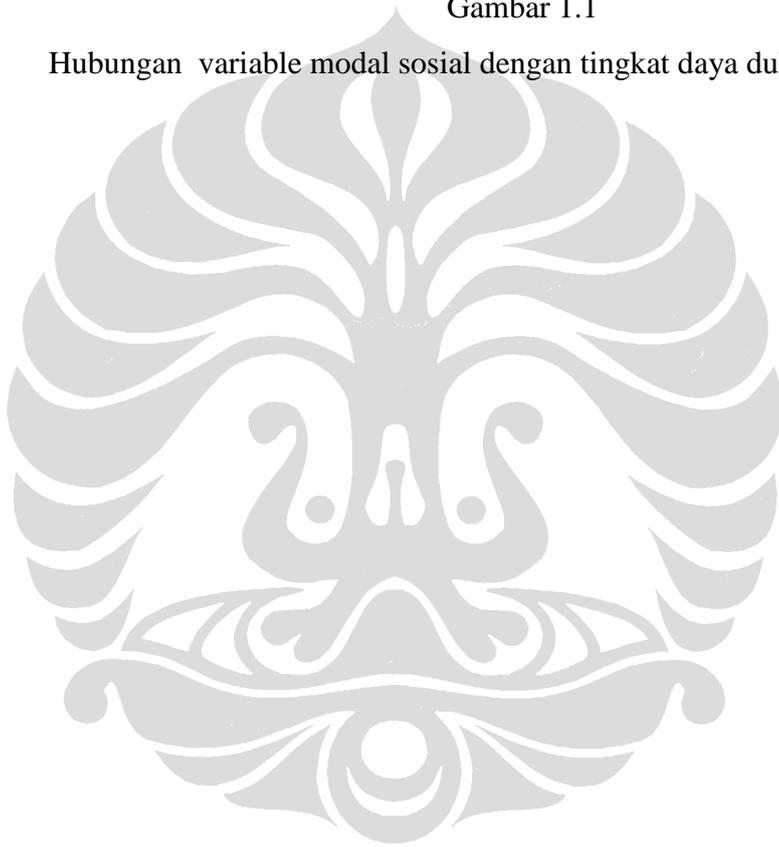
1.6.2. Hubungan antara Variabel

Hubungan antar variabel independen dan dependen dalam penelitian ini adalah asimetris dimana variabel Modal Sosial Komunitas dapat mempengaruhi variabel daya dukung lingkungan. Hal tersebut berarti semakin tinggi Modal Sosial Komunitas maka semakin tinggi pula daya dukung lingkungan (lingkungan fisik, sosial dan ekonomi) dalam menjaga kelangsungan hidup lingkungan permukiman kumuh dan sebaliknya semakin rendah Modal Sosial Komunitas maka semakin rendah pula kemampuan dukungan lingkungan fisik, sosial dan ekonomi dalam mempertahankan kelangsungan hidup lingkungan permukiman kumuh.



Gambar 1.1

Hubungan variable modal sosial dengan tingkat daya dukung lingkungan



Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Dimensi	Variabel	Indikator	Kategori	Skala	Pertanyaan	
Daya Dukung Lingkungan	Lingkungan Fisik	Jenis dan kondisi rumah hunian	- Pondasi, dinding, lantai dan atap - Kondisi penggunaan ruang	Permanen – tidak permanen	Nominal	I.1 – I.2
		Kondisi rumah	- luas, status hak tanah/bangunan, lama menempati dan jarak antar rumah	Sempit – lebar	Nominal	III.1 – III.4
		Sanitasi	- Sirkulasi udara dalam ruangan - Ketersediaan udara bersih	Memadai – tidak memadai	Ordinal	I.3 – I.4
		Air minum	- Sumber pasokan air minum untuk air bersih dan minum	Layak – tidak layak	Ordinal	I.5
		Drainase	- Kondisi buangan limbah padat - Kondisi saluran selokan	Memadai – tidak memadai	Ordinal	I.6 – I.9
		Tempat sampah	- Kondisi tempat sampah	Memadai – tidak memadai	ordinal	I.10
		Ruang terbuka hijau	- Ukuran, kelayakan dan intensitas pemakaian	Memadai – tidak memadai	Ordinal	I.11 – I.13
		Tempat Ibadah	- Jumlah, kelayakan dan intensitas pemakaian	Memadai – tidak memadai	Nominal dan ordinal	I.14 – I.16
		Jalan pemukiman	- Lebar dan kondisi jalan	Sempit – lebar	Ordinal	I.17 – I.18
		Kerawanan banjir	- Intensitas banjir	Rawan – tidak rawan	ordinal	I.19 – I.20
	Lingkungan sosial	Akses publik	- Nama kelompok, Jenis kegiatan, jumlah kegiatan per bulan, tingkat partisipasi - Kegunaan organisasi - Kondisi fasilitas public dan	Tdk pernah - sangat sering	Ordinal	II.1 dan II.3 II.2 II.4 – II.5

			intensitas			
		Tanggung jawab keluarga	- Jumlah anggota keluarga dalam satu hunian	Besar – kecil	Nominal	III.8
		Pendidikan formal	Jenis pendidikan	Tinggi – rendah	Ordinal	III.9 – III. 10
		Keamanan dan kenyamanan	- jenis kriminalitas, intensitas dan penyelesaiannya - Hubungan antar warga - Solidaritas antar warga	Tdk pernah – sangat sering	Ordinal	II.6 – II.9 II.10.II.12 II.13 – II.16
	Lingkungan Ekonomi					
		Pekerjaan	- Jenis pekerjaan	Terampil dan tidak terampil	Ordinal	III.5
		Penghasilan	- Kepala keluarga dan anggota keluarga	Tinggi – rendah	Nominal	III.6
		Pengeluaran	- Kebutuhan keluarga dalam sebulan	Tinggi – rendah	Nominal	III.7
Modal Sosial	Norma, kepercayaan dan Jaringan sosial	Kelompok dan Jaringan	Tipe jaringan (formal & informal), ukuran dan kapasitas jaringan, bentuk jaringan (vertikal dan horisontal) dan intensitas kegiatan.	Tdk pernah – sangat sering	Ordinal	I.1 – I.13
		Trust dan solidaritas	Pola kepercayaan antar warga, jenis kepercayaan informal dan formal (keluarga, teman, institusi, negara), ukuran solidaritas antar warga	Tdk pernah – sangat sering	Ordinal	II.1 – II.12
		Tindakan bersama dan kerjasama	Kegiatan yang relevan, jenis, intensitas-waktu kegiatan, pola partisipasi warga.	Tdk pernah – sangat sering	Ordinal	III.1 – III.12
		Informasi dan komunikasi	jenis informasi (formal dan informal), akses warga terhadap	Tdk pernah – sangat sering	Ordinal	IV.1 – IV.6

			informasi, bagaimana warga menerima/terdistribusi berbagai informasi untuk kawasan pemukiman, intensitas dan kualitas informasi dan komunikasi antar warga			
		Kohesi dan inklusi sosial	Pola kohesi sosial, frekuensi (ukuran)kohesi sosial dan inklusi, intensitas terjadinya inklusi sosial,	Tdk pernah – sangat sering	Ordinal	V.1 – V.13

1.6.3. Hipotesa dan Asumsi

1. Hipotesis teori yaitu Modal Sosial Komunitas merupakan sumberdaya dalam kelompok dan jaringan sosial yang dipergunakan individu-individu dalam melakukan interaksi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup. Hubungan tindakan dan kerjasama yang didasari atas kepercayaan dengan lingkungan sosial akan memperkuat kebersamaan dan kesatuan dalam satu komunitas. Hubungan informasi dan komunikasi sosial dengan kemampuan lingkungan sosial dapat mempercepat kemampuan komunitas untuk berkembang. dan hubungan kohesi dan inklusi sosial dengan daya dukung lingkungan dapat memperkuat ikatan-ikatan yang terjalin dalam satu lingkungan.
2. Hipotesis penelitian yaitu peningkatan Modal Sosial Komunitas permukiman kumuh perkotaan dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan.